

Pendidikan kewarganegaraan sebagai cara mengembangkan pemikiran politik mahasiswa

Roisul Mubaraq¹, Romi Faslah²

program studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: *raisalmub4@gmail.com

Kata Kunci:

Politik, Kewarganegaraan, Mahasiswa, Edukasi, Kajian

Keywords:

Politic, Civic, College Student, Education, Study

ABSTRAK

Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, penulis bertujuan untuk membahas apa itu pendidikan kewarganegaraan dan apa urgensi pendidikan kewarganegaraan di dalam jenjang pendidikan tinggi untuk para mahasiswa. Hasil yang didapat penulis adalah pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membentuk kapasitas kebangsaan dan pemikiran politik mahasiswa. Pertama, Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya mentransfer pengetahuan konstitusional, tetapi juga menanamkan nilai-nilai Pancasila, sikap demokratis, dan tanggung

jawab sosial melalui pendekatan karakter dan nilai. Melalui pemahaman sistem politik, proses pengambilan keputusan publik, serta hak dan kewajiban warga negara, Pendidikan Kewarganegaraan meningkatkan literasi politik dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Hal ini memotivasi partisipasi rasional dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik, sebagaimana dibuktikan oleh pengaruh signifikan Pendidikan Kewarganegaraan terhadap literasi politik mahasiswa. Adapun urgensi Pendidikan Kewarganegaraan bagi mahasiswa terletak pada perannya dalam memperkuat identitas kebangsaan dan kesiapan menghadapi tantangan global. Praktik nyata seperti simulasi bela negara dan proyek kewarganegaraan efektif membentuk cinta tanah air, toleransi, serta jati diri nasional yang kokoh di era globalisasi. Oleh karena itu, pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan dengan metode pembelajaran partisipatif, kontekstual, dan berbasis masalah menjadi kunci agar mahasiswa menjadi generasi pemikir politik yang kritis, berkarakter, dan berkontribusi positif bagi keberlangsungan demokrasi Indonesia.

ABSTRACT

Using a qualitative research method with a literature study approach, the author aims to discuss what civic education is and what is the urgency of civic education in higher education for students. The results obtained by the author show that civic education in higher education has a strategic role in shaping students' national capacity and political thinking. First, Civic Education not only transfers constitutional knowledge, but also instils Pancasila values, democratic attitudes, and social responsibility through character and value approaches. Through understanding the political system, the public decision-making process, and the rights and obligations of citizens, Civic Education improves students' political literacy and critical thinking skills. This motivates rational and responsible participation in political life, as evidenced by the significant effect of Civic Education on students' political literacy. The urgency of Civic Education for students lies in its role in strengthening national identity and readiness to face global challenges. Real practices such as state defence simulations and citizenship projects are effective in shaping love for the country, tolerance, and a strong national identity in the era of globalization. Therefore, the development of Civic Education with participatory, contextual, and problem-based learning methods is key so that students become a generation of critical political thinkers, have character, and contribute positively to the sustainability of Indonesian democracy



Pendahuluan

Sebagai negara demokrasi, Indonesia menuntut partisipasi aktif warganya dalam kehidupan politik. Untuk itu, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN). Hal ini mencerminkan peran strategis PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN dalam membentuk nasionalisme dan karakter mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Mahasiswa diharapkan menjadi *agent of change* yang memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kondisi ini menjadi krusial mengingat dinamika politik pasca reformasi dan tantangan digital saat ini, termasuk fenomena golongan putih dan apatisisme politik di kalangan pemilih muda. Oleh karena itu, literasi politik dan hukum, yakni kemampuan menganalisis informasi politik dan memahami proses pengambilan kebijakan serta pengetahuan atas suatu hukum yang tertata dan tertulis dalam suatu negara harus dibangun sejak di bangku kuliah melalui pendidikan kewarganegaraan yang kontekstual (Saifullah, 2024).

Berbagai kajian menunjukkan bahwa pembelajaran PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN di perguruan tinggi dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik mahasiswa (Hidayati et al., 2022). Menemukan bahwa PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN menumbuhkan sikap dan karakter kewarganegaraan mahasiswa, yang selanjutnya berpengaruh pada literasi politik berupa pemahaman dan kesadaran dalam aktivitas politik, pengetahuan tentang isu-isu politik, serta partisipasi politik mahasiswa. Penelitian tersebut juga melaporkan adanya pengaruh signifikan PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN terhadap literasi politik mahasiswa (sebesar 53,8%). Artinya, lebih dari setengah kemampuan literasi politik mahasiswa dapat dijelaskan oleh pengalaman mereka belajar pendidikan kewarganegaraan. Dengan kata lain, mata kuliah PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN bukan hanya mengajarkan materi normatif, melainkan membekali mahasiswa dengan kerangka berpikir kritis dan pemahaman hak-kewajiban yang membantu mereka aktif berpolitik.

Penguatan literasi politik melalui pendidikan tinggi sangat penting untuk menjawab tantangan keterbukaan informasi. Sebagai contoh, era digital membawa arus informasi yang cepat namun belum tentu akurat (Safiqa et al., 2024). Menunjukkan bahwa literasi digital kemampuan memahami, menggunakan, dan mengevaluasi informasi dari media digital sangat penting dalam membentuk wawasan politik mahasiswa masa kini. Dengan literasi digital yang baik, mahasiswa mampu meningkatkan pemahaman isu-isu politik dan lebih aktif berdiskusi secara daring. Begitu pula (Yuliandari et al., 2023), menegaskan bahwa konten PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (misalnya tentang hak dan kewajiban warga negara, demokrasi, dan hukum) berfungsi sebagai wahana efektif untuk pendidikan politik. Melalui materi tersebut, mahasiswa dibekali kerangka nilai yang relevan untuk menilai dinamika sosial-politik. Di samping itu, pengembangan keterampilan berpikir kritis melalui kurikulum kewarganegaraan akan membantu mahasiswa menyaring informasi politik dan membentuk opini secara bertanggung jawab (Adityo, 2022).

Namun demikian, penerapan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi menghadapi sejumlah tantangan (Yuliandari et al., 2023). mencatat bahwa banyak mahasiswa menjadi apatis (golput) pada Pemilu 2019 karena informasi yang tidak akurat di media sosial. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kurikulum formal dan kebutuhan literasi politik riil. Di sisi lain (Safiqa et al., 2024), menemukan hambatan teknis seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan kurangnya keterampilan digital mahasiswa dalam proses pembelajaran politik berbasis literasi digital. Selain itu, masih ada resistensi terhadap metode pembelajaran baru yang menuntut interaksi dan diskusi kritis. Tantangan-tantangan ini perlu disikapi agar PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN di perguruan tinggi benar-benar efektif menanamkan kesadaran berpolitik.

Di tengah tantangan tersebut, terdapat peluang besar untuk mengoptimalkan peran PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN. Penelitian terdahulu menegaskan bahwa literasi politik adalah elemen kunci dalam menggerakkan partisipasi politik generasi muda. Fokus pada literasi politik pemuda melalui pendidikan kewarganegaraan dianggap strategi yang paling tepat dan esensial. Sebagai bagian integral kurikulum, PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN memiliki jangkauan luas dan dapat membangun kesadaran serta partisipasi politik mahasiswa secara menyeluruh. Lewat pendekatan pembelajaran partisipatif dan penggunaan teknologi digital, PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN di perguruan tinggi dapat menjadi katalisator yang memperdalam pemahaman politik mahasiswa dan mendorong keterlibatan mereka dalam proses demokrasi (Saifullah, 2013).

Berdasarkan tinjauan di atas, jelas bahwa pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi memiliki potensi besar dalam memperkuat literasi politik mahasiswa. Artikel ini bertujuan mengeksplorasi lebih lanjut hubungan antara PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN dan kesadaran politik mahasiswa di Indonesia, dengan menyoroti pentingnya literasi politik serta mengidentifikasi tantangan dan peluang implementasinya di lingkungan pendidikan tinggi. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitiann kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Metode Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan tema penelitian (Creswell & J. David Creswell, 2018). Penulis mengumpulkan informasi yang didapat dari sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan kewarganegaraan yang memiliki sub-tema politik dengan sumber primer dari artikel jurnal, dan sumber sekunder dari buku dan artikel web.

Pembahasan

Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan (Pendidikan Kewarganegaraan) merupakan mata pelajaran yang dirancang untuk membentuk kompetensi kebangsaan peserta didik sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945. Dalam ranah pendidikan formal Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan menanamkan nilai-nilai demokrasi serta membekali siswa dengan pengetahuan dan sikap mengenai hak dan kewajiban warga negara Pendidikan Kewarganegaraan pada tingkat sekolah dasar penting dalam

membentuk pribadi siswa yang memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter. Dengan kata lain, Pendidikan Kewarganegaraan adalah rangkaian proses pembelajaran yang diarahkan agar peserta didik menjadi warga negara yang bertanggung jawab serta berperan aktif dalam masyarakat sesuai nilai Pancasila dan UUD 1945 (Magdalena et al., 2020). Undang-Undang Sisdiknas menempatkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran wajib pada semua jenjang pendidikan formal. Pernyataan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, misalnya, mendefinisikan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar tentang hubungan antara warga negara dan negara, termasuk pendidikan pendahuluan bela negara (Hidayati et al., 2022). Konteks inilah yang menjadikan Pendidikan Kewarganegaraan berperan sebagai media utama penanaman nilai kebangsaan, keadilan sosial, dan pemahaman politik bagi anak bangsa. Dengan demikian, pengertian Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya sekadar pengajaran teori konstitusi, tetapi juga pendidikan karakter demokratis yang mempersiapkan generasi muda berpikir kritis dan bertindak demokratis dalam kehidupan berbangsa.

Hubungan Pendidikan Kewarganegaraan dengan Pengembangan Pemikiran Politik Warganegara

Adapun hubungan antara pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan pemikiran politik seorang warganegara, pendidikan kewarganegaraan berkontribusi langsung dalam mengembangkan pemikiran politik warganegara serta menyadarkan warga negara akan pentingnya pengetahuan mengenai sistem politik, proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan, serta hak dan kewajiban sebagai seorang warganegara (I Made Sila, 2024). Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga memberi pemahaman terkait prinsip demokrasi dan mekanisme politik di Indonesia, sehingga warganegara dapat memiliki wawasan mendalam tentang kehidupan politik di dalam lingkungan mereka. Pendidikan kewarganegaraan juga menumbuhkan kemampuan berpikir kritis warganegara terhadap isu politik untuk menghadapi realita kehidupan politik yang sedang terjadi secara nyata (Mukmin & Sihalo, 2024). Dengan kata lain, Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya mentransfer informasi, tetapi juga memotivasi siswa untuk berpikir kritis soal kebijakan publik, partisipasi dalam pemilihan umum, dan advokasi sosial. Melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang efektif, nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial semakin internalisasi dalam diri warga negara, sehingga pemikiran politik mereka berkembang menjadi lebih rasional dan bertanggung jawab (Mulyani, 2022).

Urgensi Mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan bagi Mahasiswa

Pendidikan Kewarganegaraan tidak berhenti diajarkan pada jenjang sekolah menengah saja, pada jenjang pendidikan tinggi Pendidikan kembali diajarkan melalui matakuliah kewarganegaraan. Hal ini dikarenakan Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mewajibkan setiap lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Putri et al., 2024). Dengan diselenggarakannya pendidikan kewarganegaraan di jenjang pendidikan tinggi, mahasiswa diharapkan memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta nilai-nilai Pancasila, sekaligus menginternalisasi nilai-nilai demokrasi seperti toleransi,

penghargaan terhadap keberagaman, partisipasi, dan tanggung jawab sosial. Pendidikan Kewarganegaraan memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan sikap dan karakter luhur berdasarkan Pancasila. Misalnya, melalui kegiatan nyata seperti latihan bela negara mahasiswa belajar menumbuhkan keberanian, disiplin, dan cinta tanah air, nilai-nilai yang sejalan dengan Pancasila (Kirani & Najicha, 2022). Misalnya, melalui kegiatan nyata seperti latihan bela negara mahasiswa belajar menumbuhkan keberanian, disiplin, dan cinta tanah air, nilai-nilai yang sejalan dengan Pancasila.

Dari sisi politik, pendidikan kewarganegaraan berkontribusi penting dalam meningkatkan literasi politik mahasiswa. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan membantu mahasiswa memahami hak dan kewajiban politiknya, serta mengembangkan kesadaran berpolitik yang kritis. Selain itu, Pendidikan Kewarganegaraan berperan penting dalam memperkuat identitas kebangsaan mahasiswa. Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting mempromosikan pemahaman tentang Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan mengembangkan karakter etis, dan mendorong rasa cinta tanah air pada generasi muda. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memahami dasar negara Indonesia, tetapi juga mampu meneguhkan identitas nasionalnya di tengah arus globalisasi. Pendidikan Kewarganegaraan membantu menjaga keutuhan nilai kebangsaan (Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika) dengan membangun kesadaran historis dan nasionalistis mahasiswa, sehingga mereka tidak mudah terpengaruh atau kehilangan jati diri oleh budaya asing (Putri et al., 2024).

Kesimpulan dan Saran

Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membentuk kapasitas kebangsaan dan pemikiran politik mahasiswa. Pertama, Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya mentransfer pengetahuan konstitusional, tetapi juga menanamkan nilai-nilai Pancasila, sikap demokratis, dan tanggung jawab sosial melalui pendekatan karakter dan nilai. Melalui pemahaman sistem politik, proses pengambilan keputusan publik, serta hak dan kewajiban warga negara, Pendidikan Kewarganegaraan meningkatkan literasi politik dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Hal ini memotivasi partisipasi rasional dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik, sebagaimana dibuktikan oleh pengaruh signifikan Pendidikan Kewarganegaraan terhadap literasi politik mahasiswa. Adapun urgensi Pendidikan Kewarganegaraan bagi mahasiswa terletak pada perannya dalam memperkuat identitas kebangsaan dan kesiapan menghadapi tantangan global. Praktik nyata seperti simulasi bela negara dan proyek kewarganegaraan efektif membentuk cinta tanah air, toleransi, serta jati diri nasional yang kokoh di era globalisasi. Oleh karena itu, pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan dengan metode pembelajaran partisipatif, kontekstual, dan berbasis masalah menjadi kunci agar mahasiswa menjadi generasi pemikir politik yang kritis, berkarakter, dan berkontribusi positif bagi keberlangsungan demokrasi Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adityo, R. D. (2022). Ambiguitas Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Sosial. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 08(11), 75–89. <http://repository.uin-malang.ac.id/11293/>
- Creswell, J. W., & J. David Creswell. (2018). A Mixed-Method Approach. In H. Salmon (Ed.), *Writing Center Talk over Time* (5th ed.). Sage Publications. <https://doi.org/10.4324/9780429469237-3>
- Hidayati, E., Eddison, A., & Arianto, J. (2022). Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Literasi Politik Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Riau Angkatan 2018-2019). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 10959–10966. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/4169>
- I Made Sila. (2024). Membangun Kesadaran Hukum Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(1), 8–14. <https://doi.org/10.60153/jocер.v2i1.49>
- Kirani, A. P., & Najicha, F. U. (2022). Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Society 5.0 Mendatang. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 8(2), 767–773. <https://doi.org/10.31949/educatio.v8i2.2391>
- Magdalena, I., Haq, A. S., & Ramdhan, F. (2020). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Sekolah Dasar Negeri Bojong 3 Pinang. *Jurnal Pendidikan Dan Sains*, 2(3), 418–430. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/bintang>
- Mukmin, B. A., & Sihaloho, O. A. (2024). Pendidikan Kewarganegaraan Transformatif: Menuju Warga Negara Berpikir Politis. *Jurnal Transformatif*, 10(2), 170–196. <https://doi.org/10.21776/ub.transformatif.2024.010.02.2>
- Mulyani, S. D. (2022). peranan pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan partisipasi politik siswa. *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan*, 12(2), 104. <https://doi.org/10.35194/jpphk.v12i2.2185>
- Putri, M. F. J. L., Mumung, K. E., & Sulistiawati, D. (2024). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Membangun Karakter Kebangsaan di Era Globalisasi. *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*, 4(2), 73–79. <https://doi.org/10.47200/aossagcj.v4i2.2717>
- Safiq, F. N., Ma, M., Putri, A., & Sofie, N. (2024). Peluang dan Tantangan Pemanfaatan Literasi Digital dalam Optimalisasi Pendidikan Politik Mahasiswa PPKn UAD. *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(1), 37–42. <https://journal1.uad.ac.id/index.php/Citizenship/article/view/1063#:~:text=digital%2C yang mencakup kemampuan untuk,dan resistensi terhadap perubahan metode>
- Saifullah. (2024). *Teori Hukum: Saripati Pemikiran Teoritisi Islam* (1st ed.). Rumpun Dua Belas (R12 Grup). <http://repository.uin-malang.ac.id/20706/>
- Saifullah, S. (2013). REFLEKSI EPISTEMOLOGI DALAM METODOLOGI PENELITIAN (Suatu Kontemplasi atas Pekerjaan Penelitian). *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 5(2), 178–188. <http://repository.uin-malang.ac.id/2351/>
- Yuliandari, E., Muchtarom, M., & Widiatmaka, P. (2023). PENDIDIKAN POLITIK MELALUI PENGUATAN LITERASI DIGITAL DALAM PROSES PEMBELAJARAN MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN. *Kwangsan: Jurnal Teknologi Pendidikan*, 11(1), 186. <https://doi.org/10.31800/jtp.kw.v11n1.p186-205>